POLRI DAN KORUPSI

Oleh: Muradi•

Penetapan Irjen Pol. Djoko Susilo sebagai tersangka korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi satu langkah strategis KPK untuk mengusut sejumlah praktik korupsi lainnya di internal Polri. Mantan Direktur Lalulintas (Dirlantas) Mabes Polri tersebut menjadi perwira tinggi pertama Polri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penetapan Djoko Susilo sebagai tersangka yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Akademi Polisi (Akpol) seolah menegaskan asumsi publik bahwa terdapat praktik korupsi di tubuh Polri. Bila sebelumnya publik hanya menduga-duga terkait dengan praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi, maka dengan ditetapkannya Djoko Susilo menjadi pembenar akan adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Polri.

Sesungguhnya penetapan Djoko Susilo menjadi tersangka oleh KPK bukan hal yang istimewa apabila merunut anatomi organisasi Polri, di mana Unit Lantas tempat di mana Djoko Susilo menjabat sebagai Dirlantas dan Unit Reskrim adalah 'ATM berjalan' bagi Polri pada semua tingkatan. Hal inilah yang kemudian menjadi pembenar di internal bahwa dua unit di Polri tersebut untuk mengeruk uang; baik diperuntukkan bagi dukungan operasional Polri, maupun untuk memperkaya diri. Tak heran apabila banyak dari perwira tinggi Polri yang teridentifikasi memiliki rekening miliaran rupiah adalah mereka yang pernah menjabat pada dua unit tersebut pada berbagai tingkatan di Polri.

Djoko Susilo sendiri merupakan salah satu perwira terbaik di Akpol tahun 1984, yang diprediksikan akan memimpin Polri menjadi institusi yang professional, mandiri dan bersih dari praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Harapan tersebut tidak muluk mengingat periode pendidikan Djoko Susilo di Akpol, Polri ketika itu dilanda kegaduhan internal karena Wakapolri saat itu, Komjen Pol Siswadji dipenjarakan karena praktik korupsi. Akan tetapi, setelah 28 tahun, Djoko Susilo justru mengikuti jejak Siswadji dan sejumlah perwira tinggi Polri lainnnya yang terjerat kasus korupsi.

Budaya Organisasi dan Gaya Hidup

Banyak pertanyaan dari publik terkait dengan makin maraknya praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi di Polri paska berpisah dari ABRI. Bahwa dalam konteks budaya militeristik, bisa saja Polri telah sedikit banyak terbebas dari kekangan TNI. Namun budaya organisasi di Polri relaif tidak berubah, bahkan *esprit de corps* yang membabi buta menjadikan Polri menjadi institusi anti-kritik. Kasus Rekening Gendut Perwira Tinggi Polri

---

•Penulis Dosen Politik pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Padjadjaran. Alamat:, Jl. Saturnus Utara XIV No. 1, Kompleks Margahayu Raya, Bandung. Phone: 022 7500371 / 081384330813 Email: muradi_clark@unpad.ac.id, www.muradi.wordpress.com No. Acc BCA: 111-111-0781

tidak secara serius ditangani oleh Mabes Polri. Padahal dari data yang beredar di masyarakat hal tersebut telah terang benderang, sehingga Polri tinggal menindaklanjutinya. Akan tetapi, dengan dalih menjaga semangat keorganisasian, Mabes Polri enggan untuk memprosesnya.

Tentu aja budaya organisasi yang tidak transparan akan menyuburkan praktik penyimpangan dan korupsi. Langkah Polri yang berupaya menyimpan rapat-rapat kebobrokan oknum perwiranya bagai dua mata pisau pembenar bagi sejumlah perwira dan personil lainnya untuk berlaku sama, di sisi lainnya bilapun tertangkap tangan, hukuman internal yang diterapkan tidak memberikan efek jera. Selain kasus Rekening Gendut, sejumlah kasus lain yang menjerat oknum anggota polri dari level terendah hingga tinggi tidak disikapi secara tegas oleh Mabes Polri.

Bisa saja hal tersebut dikarenakan adanya eforia berlebihan paska berpisah dari TNI, dimana Polri hanya menjadi pelengkap dari tiga matra lainnya saat bersama-sama menjarah uang Negara. Namun, tentu tidak bisa dibenarkan apabila hal tersebut menjadi alasan dari praktik penyimpangan dan korupsi yang dilakukan oleh anggota Polri.

Selain itu, praktik gaya hidup anggota Polri menjadi bagian dari masih maraknya praktik korupsi di Polri. Sudah menjadi rahasia umum apabila anggota Polri dari berbagai pangkat dan tingkatan berlomba untuk memperkaya diri. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemenuhan gaya hidup yang mewah yang dijalani. Tak heran apabila di banyak daerah, terlihat kontras penampilannya antara pimpinan Polres dengan komandan Kodim setempat. Dan hal tersebut secara berjenjang terjadi di setiap tingkatan dan kepangkatan. Gaya hidup ini juga pada akhirnya menjadi pembenar setiap praktik dan prilaku korup yang dijalani sebagai bagian dari pemenuhan anggaran operasional dan gaya hidup itu sendiri.

Berkaca pada penetapan Djoko Susilo sebagai tersangka oleh KPK akan ada tiga skenario bila berkaca pada uraian diatas, yakni: Pertama, pimpinan Polri secara terbuka mempersilakan KPK untuk mengusut tuntas praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh Djoko Susilo saat menjabat Dirlantas. Langkah ini akan diikuti oleh praktik bersih-bersih pimpinan Polri di semua unit dan tingkatan. Akan tetapi pada skenario ini belum terlihat dilakukan oleh Polri, bilapun ada baru sebatas mempersilakan namun pada praktiknya justru mengarah pada penolakan dan ketidaksetujuan Polri atas langkah KPK menetapkan tersangka Djoko Susilo

Kedua, Polri akan secara implisit maupun eksplisit akan memosisikan Djoko Susilo sebagai asset berharga Polri, di mana salah satunya melakukan pembelaan penuh; menyiapkan pengacara dan didampingi selama proses penyidikan. Indikasi dari kemungkinan berjalannya scenario kedua ini adalah sikap tidak kooperatif dari sejumlah perwira dan personil di Ditlantas Mabes Polri saat Tim Penyidik KPK hendak membawa barang bukti dari gedung Ditlantas ke KPK.

Ketiga, Mabes Polri akan mengorbankan Djoko Susilo semata dan menutuk akses KPK untuk pengusutan unit lainnya di internal Polri. pada

skenario ketiga ini Polri akan cenderung menjadikan Djoko Susilo sebagai sasaran tembak KPK agar unit lainnya di Polri tidak terkena imbas. Skenario ini sedikit banyak mirip dengan yang terjadi pada kasus Nazarudin, mantan Bendahara Partai Demokrat.

Dari tiga skenario tersebut di atas, penulis cenderung mengarah pada skenario kedua bila mengacu pada masih kuatnya budaya organisasi dan gaya hidup yang dipraktikkan di Polri. Hal ini pada akhirnya akan menguatkan sikap anti-kritik dan menganggap penangkapan Djoko Susilo sebagai bagian dari upaya merusak citra Polri, sebagaimana yang terjadi pada beberapa kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta kasus Rekening Gendut yang menguap tanpa jejak.